



# **ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN DENGAN SURAT**

**(Studi Terhadap Putusan Perdata No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk Tentang Gugatan Wakaf)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung**

Oleh

**Aswin Sidiq**  
NPM : 1021010021

Program Studi: Ahwal Al-Syakhshiyah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1438H/2017M**

## ABSTRAK

Pranata wakaf di Indonesia semenjak zaman kolonial Belanda sudah diatur. Karena itu, pemerintah mengakomodasinya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan, mulai dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan lainnya. Hal ini bertujuan pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai harapan. Sebagai contoh perkara No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk tentang sengketa wakaf, menarik untuk dibahas, sebab dalil gugatan perkara ini adalah berkurangnya luas tanah wakaf yang dikelola oleh nadzir. Untuk menganalisis perkara tersebut, ditekankan pada pembuktian surat.

Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata No.077/Pdt.G/2012/PA.Tnk tentang sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yakni mengambil data yang diperoleh dari Pengadilan Agama. Metode pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dari data primer berupa salinan putusan perkara No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk serta data sekunder berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan dalil-dalil dalam kajian perwakafan. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan pola pemikiran deduktif dan induktif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum terhadap pembuktian dengan surat pada sengketa wakaf serta mengetahui kedudukan persangkaan hakim dan kesaksian dalam pembuktian perkara No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk pada Pengadilan Agama Tanjung Karang. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai perwakafan khususnya dalam pembuktian dengan surat dan penyelesaian sengketa wakaf. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman perwakafan khususnya dalam pembuktian surat dan penyelesaian sengketa wakaf. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka simpulan dari rumusan masalah pada penelitian ini adalah bahwa hakim dalam memutus perkara No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk cenderung lebih mengedepankan alat bukti surat. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasari bahwa dalam perkara ini alat bukti surat yang disajikan sudah sangat lengkap dan jelas serta memiliki kekuatan hukum yang menjadi landasan hakim memutuskan perkara ini. Hal ini tidak berarti hakim mengesampingkan alat bukti lainnya, melainkan alat bukti surat dalam perkara ini dinilai memiliki pertimbangan yang lebih, guna memutus sengketa wakaf.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung (0721) 703260

**PERSETUJUAN**


Tim Pembimbing, setelah memperbaiki dan memberi masukan dan arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Nama Mahasiswa : ASWIN SIDIQ**  
**NPM : 1021010021**  
**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN DENGAN SURAT (Studi Terhadap Putusan Perdata No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk Tentang Gugatan Wakaf)**


**DISETUJUI**

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

  
**Drs. H. Haryanto H., M.H**  
**NIP. 195612051983031002**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Khoirul Abror., M.H**  
**NIP. 195704031987031003**

**Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah**

  
**Marwin S.H., M.H.,**  
**NIP. 197501292000031001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN  
DENGAN SURAT (Studi Terhadap Putusan Perdata No. 077/Pdt.G/  
2012/PA.Tnk Tentang Gugatan Wakaf), disusun oleh ASWIN SIDIQ**  
NPM: **1021010021** Program Studi: **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah  
diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan  
Lampung pada hari/tanggal Rabu, 22 November 2017.

**TIM DEWAN PENGUJI**

Ketua : Yufi Wiyos Rini, S.Ag., M.Si

Sekretaris : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji II : Drs. H. Haryanto, M.H

**Dekan,**

**Dr. Alamsyah, M.Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

{Q.S. Al-Baqarah (2): 282}<sup>1</sup>



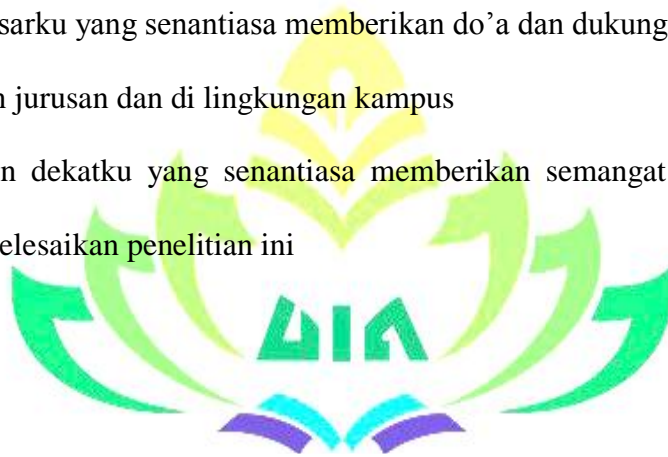
---

<sup>1</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 60

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrohiim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobil'alamiin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, karya tulis ini dipersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu
2. Kakak dan adikku
3. Keluarga besarku yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan untukku.
4. Rekan-rekan jurusan dan di lingkungan kampus
5. Untuk teman dekatku yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini

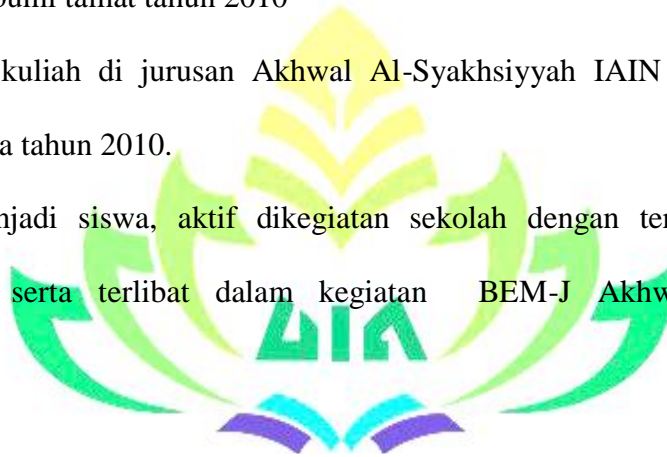


## **RIWAYAT HIDUP**

Nema lengkap Aswin Sidiq, lahir di Kotabumi, 11 September 1992. Putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhani Mufrod dan Ibu Dwi Korawati. Selama ini menempuh jenjang pendidikan dimulai dari:

1. TK Islam Ibnu Rusyid Kotabumi tamat tahun 1997
2. SD Islam Ibnu Rusyid Kotabumi tamat tahun 2004
3. MTs.N 1 Kotabumi tamat tahun 2007
4. MAN 1 Kotabumi tamat tahun 2010
5. Melanjutkan kuliah di jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2010.

Selama menjadi siswa, aktif dikegiatan sekolah dengan tergabung bersama OSIS serta terlibat dalam kegiatan BEM-J Akhwal Al-Syakhsiyyah.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah sehingga skripsi dapat terselesaikan. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) di Jurusan Akhwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang ilmu syariah.

Dalam mengerjakan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.selakuDekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H.,selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Khorul Abror, M. H., selaku pembimbing II yang telah membimbing peneliti dalam penulisan skripsi ini, mulai dari mengarahkan, memotivasi dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, staf karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung .



5. Rekan-Rekan yang telah ikut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah swt, amin.

Peneliti menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi masih membutuhkan saran dan solusi yang disebabkan keterbatasan penulis dalam membahas materi, serta waktu dan lainnya. Untuk itu kiranya para Pembaca dapat memahaminya. Terimakasih.

Bandar Lampung, Oktober 2016

Penulis

Aswin Sidiq  
NPM. 1021010021



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian.....	8

<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN SAKSI DAN WAKAF</b>	
A. Pembuktian Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam .....	14
2. Dasar Hukum Pembuktian dalam Islam .....	16
3. Alat Bukti Menurut Hukum Islam .....	18
4. Alat Bukti Surat Dalam Hukum Islam .....	22
B. Pembuktian Dalam Hukum Positif	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian .....	25
2. Alat Bukti Menurut Hukum Positif .....	29
3. Alat Bukti Surat .....	33
C. Pembuktian dan Alat Bukti Yang Digunakan di Pengadilan Agama .....	37
D. Urgensi Kewajiban Pembuktian	
1. Urgensi Pembuktian .....	46
2. Kewajiban Pembuktian .....	47
3. Cara-Cara Pembuktian .....	49

<b>BAB III : LAPORAN PENELITIAN .....</b>	
A. Tinjauan Umum Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	52
B. Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama .....	
60	
C. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk .....	
64	

<b>BAB IV : ANALISIS DATA.....</b>	68
------------------------------------	----

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	
A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
-----------------------------	--

<b>LAMPIRAN.....</b>	
----------------------	--



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan penulis jelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan apa yang penulis maksud. Judul penelitian yang dibahas adalah: “Analisis Hukum Terhadap Pembuktian Dengan Surat Dalam Perkara Wakaf Pada Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No. 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk) Adapun maksud dan pengertiannya, dapat dilihat dari penjelasan berikut ini:

#### **1. Analisis Hukum**

Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur dari konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dan lain-lain).<sup>2</sup>

#### **2. Pembuktian dengan Surat**

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>3</sup> Alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut

---

<sup>2</sup> R. Otje Salman, *Filsafat Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), h. 16

<sup>3</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 50.



dengan istilah “alat bukti tulisan” atau ada pula yang menyebut dengan akta.

### 3. Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu *al-tahbis* yang berarti menahan, menghentikan. Menurut istilah ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari ridha Allah SWT.<sup>4</sup> Perkara Wakaf adalah persoalan atau masalah yang harus diselesaikan mengenai menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan guna mencari ridha Allah SWT.<sup>5</sup>

### 4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat sistem peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Agama. Posisi Pengadilan Agama adalah sebagai lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tertentu sesuai aturan yang ada. Berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

---

<sup>4</sup>Adijani al-Alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 23

<sup>5</sup>Sabiq, Sayid. 1994. *Fiqh al-Sunnah*. (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 61

perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, wasiat, zakat, infak, shadakah.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah menganalisis pembuktian dengan alat bukti surat dalam perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang No.077/Pdt.G/2012/PA.Tnk.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi perwakafan yang berlaku, mulai dari tata cara perwakafan, penggunaan wakaf produktif yang mengakibatkan sengketa wakaf bermunculan di tengah upaya menjadikan wakaf sebagai salah satu sarana membangun umat.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tempuh sebagai mahasiswa di jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi hukum keluarga di mana wakaf adalah bagian dari kajian perkulihan.
- b. Permasalahan perwakafan yang selalu saja terjadi.
- c. Kemudahan dalam mencari data di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

---

<sup>6</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta:IMAN Press, 2004), h. 98

### C. Latar Belakang Masalah

Pranata wakaf di Indonesia dewasa ini semakin mendapat perhatian karena urgensinya dalam upaya peningkatan perekonomian umat. Elaborasi terhadap beberapa aspek penting dalam pengelolaan harta wakaf senantiasa dilakukan salah satunya adalah aspek kepastian hukum. Wakaf di Indonesia dewasa ini semakin mendapat perhatian karena urgensinya dalam upaya peningkatan perekonomian umat. Secara yuridis pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1978, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, tujuan utama pengembangan aspek ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap harta wakaf agar terjauh dari upaya penyerobotan sehingga eksistensinya tetap utuh dan lestari sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>7</sup>

Wakaf bukan seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna.<sup>8</sup> Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan. Karena adanya wakaf umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang hasil dari wakaf mereka masih juga kekal.<sup>9</sup> Wakaf yang berasal dari hukum Islam telah diterima oleh hukum adat bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah Nusantara ini.

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h, 47

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hasil wakaf atau dana wakaf dapat di gunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Penggunaan hasil pengolahan wakaf dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.<sup>10</sup>

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum Islam kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.<sup>11</sup> Dalam hal pembuktian ini pihak-pihak berperkara harus aktif dan berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan, sedangkan hakim bersifat pasif. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya, tetapi yang perlu dibuktikan adalah peristiwanya atau hubungan hukumnya yang menjadi dasar adanya hak perdata pihak-pihak berperkara. Mengapa demikian? Karena hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan hakimlah yang bertugas menerapkan hukum perdata (materil) terhadap perkara yang diperiksa dan diputuskannya.

Dalam proses pembuktiannya dihadirkan orang sebagai saksi, yaitu saksi yang dapat membuktikan terhadap terjadinya suatu perkara. Saksi dapat diartikan orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR. Para pihak yang

---

<sup>10</sup> M. A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta : Ciber PKTTI-UI, 2001), h. 42

<sup>11</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Cet.VII) (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008), h. 1



berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, majelis hakim memerlukan pembuktian yang meyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar dan adil.<sup>12</sup>

لِّلّٰهِ الشَّهَادَةُ وَاقِيْمُوا مِّنْكُمْ عَدْلَ ذَوٰى وَّاشْهَدُوْا

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” {Q.S. At Thalaq (65):2}<sup>13</sup>

Ayat di atas mengharuskan setiap muslim yang mampu untuk menegakkan kesaksian itu secara benar dan tulus karena Allah.<sup>14</sup> Persaksian itu merupakan pengajaran yang diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mengumumkan dan menegakkan kesaksian yang sesuai akan menjamin bahwa tak seorang pun mau bertindak tak adil dan hanya mementingkan diri sendiri. Semua pihak harus ingat bahwa peristiwa ini sangat penting, menyangkut kehidupan yang sangat dalam, dan itulah posisi mukmin dalam dunia rohani<sup>15</sup> bersamaan dengan itu disertai dengan persaksian.<sup>16</sup>

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai perkara wakaf dalam bentuk sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan meninjau atau menganalisis putusan pengadilan No.077/Pdt.G/2012/PA.Tnk. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2008), h. 126

<sup>13</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 14 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), h. 137

<sup>15</sup> Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2016), h. 774

<sup>16</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11* (Jakarta: Gema Insani: 2004), h. 307

“Analisis Pembuktian Dengan Surat Perkara Wakaf Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Pengadilan No.077/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata No.077/Pdt.G/2012/PA.Tnk tentang sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata No.077/Pdt.G/2012/PA.Tnk di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang.

##### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian mengenai perwakafan khususnya dalam pembuktian dengan surat dan penyelesaian sengketa wakaf.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman perwakafan khususnya dalam pembuktian dengan surat dan penyelesaian sengketa wakaf.

- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

Penggunaan suatu metode adalah keharusan dalam sebuah penelitian agar validitas data bisa dicapai. Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data. Namun sebelum memaparkan ketiga metode tersebut, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu tentang sifat dan jenis penelitian.

### **1. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>17</sup> Pecanderaan terhadap fakta tersebut akan menjadi pijakan untuk mengambil kesimpulan umum sehingga dapat dijadikan sebagai dasar prediksi untuk memikirkan tindakan praktis pada saat ini atau pun pada masa yang akan datang.

### **2. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian pustaka adalah “pengumpulan data yang dilakukan

---

<sup>17</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 70

dilapangan secara sistematis tentang berbagai macam data yang berhubungan dengan masalah lapangan”.<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.<sup>19</sup> Artinya dalam konteks penelitian ini bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting. Sebagai rujukan utama dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data primer ialah data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis, wawancara langsung dengan hakim pada Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dan Pengurus Perserikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>18</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Jakarta: Sumbangsih, 1975), h. 2

<sup>19</sup> Sumardi Suryabrata, *Op. Cit.* h. 80



Merupakan sekumpulan data yang akan menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang berkaitan dengan skripsi yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi. Data sekunder pada penelitian ini adalah peraturan-perundang-undangan, peraturan Badan Wakaf Indonesia, serta referensi lainnya berupa buku yang terkait dengan perwakafan dan hukum acara pada pengadilan agama.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu: metode observasi, metode interview dan metode dokumentasi.

##### a. Metode Observasi

Menurut S. Margono, “Metode observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”.<sup>21</sup> Jadi metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dari suatu objek yang diselidiki.

##### b. Metode Interview

Menurut S. Margono, “Metode interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup> S. Margono, *Op Cit*, h. 158.

pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga”.<sup>22</sup> Metode interview ini dalam penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>23</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah. Catatan atau tanda ditempatkan dibagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

---

<sup>22</sup>*Ibid.* h. 165.

<sup>23</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 202

c. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*sistemaziting*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang dibahas akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>24</sup> Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa.<sup>25</sup> Penulis akan menganalisisnya secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penejelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini antara lain :

a. Metode Berfikir *Deduktif*

Metode deduktif, yaitu: “Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus.”<sup>26</sup> Kaitan dengan proposal ini, adalah

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 334

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis, dan Disertasi Jilid I*, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 47

metode deduktif ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, dari berbagai buku-buku fikih, hadits dan sebagainya, tentang suatu konsep, teori ataupun pendapat tentang pembuktian dengan saksi perkara wakaf pengadilan agama yang kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.

b. Metode Berfikir *Induktif*

Metode berfikir Induktif, yaitu: Suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>27</sup> Berkaitan dengan proposal ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa atau menggali data-data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan pembuktian dengan saksi perkara wakaf di pengadilan agama.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 41



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN WAKAF

#### E. Pembuktian dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Islam, pembuktian dikenal dengan istilah *al-Bayyinah*.<sup>28</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). Secara teknis berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa alat bukti adalah cara atau alat yang digunakan dalam pembuktian.<sup>29</sup> Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hanbali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi mayoritas ulama yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibn Qayyim sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majlis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majlis hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya.<sup>30</sup>

Selanjutnya, pembuktian dalam arti luas menghasilkan konsekwensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin. Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 135

<sup>29</sup> Abdurrahman Ibrahim Al-Humaidi, *al-Qadha' Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah* (Cet. I) (al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jani" ah Umm al-Qura, 1989), h. 382

<sup>30</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin* (Mesir : Mathba'ah Sa'adah, tt), h. 97

- a. “*Yaqiin*” : menyakinkan, yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%)
- b. “*Zhaan*” : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99 %). Zhaan ini tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan apa yang menjadi tantangan bagi apa yang telah diyakini itu. Lebih-lebih lagi kalau zhaan itu nyata pula salahnya. Di dalam kitab *al-Asybah wan Nadhair* , karangan As-Suyuti dan Ibnu Nujaim ada suatu kaidah, yaitu:

لَا عِزَّةَ بِالظَّنِّ الْبَيْنِ خَطْوُهُ

“Tidak sah menjadi pegangan zhaan yang nyata salah”<sup>31</sup>

- c. “*Syubhaat*” : ragu-ragu (terbukti 50%)
- d. “*Waham*” : sangsi, lebih banyak tidak adanya pembuktian dari pada adanya (terbukti <50 %), maka pembuktiannya lemah.<sup>32</sup>

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim pada tingkat yang meyakinkan (terbukti 100%) dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat ini dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW., lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 130

<sup>32</sup> Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 136

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 136

## 2. Dasar Hukum Pembuktian dalam Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai pembuktian terdapat pada firman Allah  
Sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki  
(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang  
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,  
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.”  
{Q.S. Al-Baqarah (2): 282}<sup>34</sup>

Pembuktian ini berlaku pada perkara yang menyangkut harta dan  
segala yang diperhitungkan sebagai kekayaan. Ditematkannya dua  
orang wanita sama dengan seorang laki-laki karena lemahnya akal kaum  
wanita.<sup>35</sup>

Kemudian, Allah juga berfirman sebagai berikut:

فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka  
hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi  
mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian  
itu).”<sup>36</sup>

<sup>34</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 60

<sup>35</sup> Ibnu Katsiir, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), h. 85

<sup>36</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h.

Ini perintah Allah agar mengadakan saksi-saksi sehingga tidak terjadi penyimpangan.<sup>37</sup>

b. Hadits

عن ابن عباس أنّ النبي صلعم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لأدعى ناس دماء

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki”

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا تَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَّنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa 'Abdullah bin 'Utbah berkata, aku mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu (sebagai pedoman) pada masa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan hari ini wahyu sudah terputus. Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal amal yang nampak (zhahir). Maka siapa yang secara zhahir menampakkan perbuatan baik kepada kita, kita percaya kepadanya dan kita dekat dengannya dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya karena hal itu sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang menampakkan perbuatan yang jelek

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Op.Cit.*, h. 426

kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan tidak membenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik". (H.R. Bukhari No. 2447)

### 3. Alat Bukti Menurut Hukum Islam

Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.<sup>38</sup> Menurut Samir

'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan,
- b. Saksi,
- c. Sumpah,
- d. Qarinah,
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak,
- f. Pengetahuan hakim.<sup>39</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, alat-alat bukti itu ada dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Fakta yang bicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah.
- b. Pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat.
- c. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya.
- d. Pembuktian dengan penolakan sumpah berlaka.
- e. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan.
- f. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat.
- g. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat.

Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang memiliki saksiitu (*al-yamin ma'a asy-syahid*). Ini pernah dilakukan oleh

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 207

<sup>39</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 57

Rasulullah Saw. dalam hal seorang telah mengaku masuk Islam dengan seorang saksi sumpahnya.<sup>40</sup> Alat bukti berupa satu orang saksi dapat dikuatkan dengan sumpah penggugat. Alat bukti ini digunakan dalam perkara berdasarkan pasal 159 dan 155 HIR. Ada pun dalam hukum islam terdapat perbedaan dikalangan ulama fiqih dalam hal menerima atau tidaknya alat bukti berupa satu orang saksi dan sumpah penggugat, jumhur ulama fuqaha menerima alat bukti satu orang saksi dengan sumpah penggugat dalam hal perkara harta benda saja, sedangkan golongan yang tidak menerima kesaksian seorang saksi laki-laki dengan diperkuat oleh sumpah si penggugat berpegang pada nash Al-quran yang mengharuskan dua orang laki-laki atau dengan dua orang perempuan.<sup>41</sup>

h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwalian, perdamaian, pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat keperdataan<sup>42</sup>.

i. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.

Ada pula ahli hukum Islam (fuqaha') yang membolehkan pembuktian dengan seorang saksi saja, yaitu dalam kesaksian awal bulan Ramadhan.

---

<sup>40</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1960), h. 468

<sup>41</sup> Miki Mahardi, *Keterangan Satu Orang Saksi Yang Dikuatkan Dengan Sumpah Penggugat Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari hukum Islam* (Padang: Universitas Andalas, 2011), h. iii

<sup>42</sup> Muhammad Salman Madkur, *Al Qada'u Fy Islam* (Mesir: Dar an Nahdah Al-Qalyuby, t.t), h. 22



- j. Keterangan saksi/dua orang perempuan dan sumpah penggugat.
- k. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa wanita boleh menjadi saksi meskipun tidak disertai saksi laki-laki dalam hal yang hanya boleh dilihat kaum wanita saja seperti peristiwa kelahiran, keperawanan, cacat pada tubuh wanita dan persususan serta *radha'ah*.<sup>43</sup>

- l. Saksi tiga orang laki-laki.
- m. Saksi empat orang laki-laki.

Keharusan saksi 4 orang lelaki beragama Islam dalam perkara pidana rajam dan dera akibat zina, adalah suatu kemurahan dari Allah bagi manusia, agar tidak mudah terkena rajam dan terkena pukulan dera 100 kali cemeti.<sup>44</sup>

- n. Kesaksian budak.

Merdeka ialah saksi dalam memberikan kesaksian harus termasuk orang yang merdeka yaitu tidak sebagai budak atau orang yang tidak memiliki kebebasan hidup seperti manusia lainnya.<sup>45</sup>

- o. Kesaksian anak-anak dibawah umur (sudah *mumayyiz*).

Menurut ketentuan Pasal 171 KUHAP yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah ialah: Anak yang umurnya belum lima belas tahun dan belum pernah kawin.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 102

<sup>44</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 165

<sup>45</sup> Fiqihi Rijal, *Alat Bukti Dalam Pengadilan Agama*. On.Line: [http://pa-marabahan.go.id/index.php?content=mod\\_berita&id=263](http://pa-marabahan.go.id/index.php?content=mod_berita&id=263)

<sup>46</sup> Novelina MS Hutapea, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal : Habonaron Do Bona; Edisi 2, Juli 2010, h. 2

p. Kesaksian orang yang fasik

Orang fasik bukanlah orang yang benar-benar kafir, karena paling tidak dari statusnya mereka sekubu dengan kaum Muslim. Hanya, mereka merupakan kelompok yang paling tidak dapat dipercaya dan cenderung menampakkan sifat nifaq-nya pada setiap kesempatan.

q. Kesaksian orang non Islam

Pembuktian saksi bagi wasiat hartadalam perjalanan (musafir) boleh oleh 2 orang lelaki yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang perempuan yng semuanya bukan beragama Islam.<sup>47</sup>

r. Bukti pengakuan.

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut *al-iqrar* dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda), *confession* (inggris), yang artinya ialah salah-satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat “di muka sidang” bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.<sup>48</sup> Kemudian bentuk pengakuannya, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUH Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum.<sup>49</sup>

s. Pengetahuan hakim.

Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para

---

<sup>47</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 106

<sup>48</sup> Roihan A. Rasyid, *Op.Cit.*, h. 178

<sup>49</sup> Aza, *Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, On.Line: <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>.

saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakat dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetilkan, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim.<sup>50</sup>

- t. Berdasarkan berita mutawatir .
- u. Berdasarkan berita tersebar (*khobar istifadloh*).
- v. Berdasarkan berita orang perorang.
- w. Bukti tulisan.
- x. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak.
- y. Berdasarkan hasil undian.
- z. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.<sup>51</sup>

#### 4. Alat Bukti Surat (*Maktubah*)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

- a. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama.
- b. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang

---

<sup>50</sup> Sudikno, *Op.Cit.*, h. 130

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 61

dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.<sup>52</sup>

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok (*formalitas causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta (*eksplote*), sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah.
- b. Sebagai alat bukti. Pada umumnya, pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.
- c. Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai "*probationis causa*", sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.<sup>53</sup>

Fungsi dari tulisan atau surat dari segi hukum pembuktian.

- a. Berfungsi sebagai formalitas kausa maksudnya surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan tidak dengan surat atau akta tindakan itu menurut hukum tidak

---

<sup>52</sup> Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 142

<sup>53</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 176

sah karena karena tidak memenuhi formalitas kausa. Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan surat atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Surat atau akta oleh hukum dijadikan sebagai formalitas kausa atau keabsahan perbuatan itu.

- b. Berfungsi sebagai alat bukti maksudnya surat atau akta sebagai alat bukti, memang tujuan utama membuat akta diperuntukkan dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam transaksi jual beli para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu. Apabila timbul sengketa sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi. Dalam masyarakat sekarang segala aspek kehidupan direkam dalam bentuk akta tidak hanya yang menyangkut kegiatan bisnis bahkan aspek kehidupan keluarga pun dicatat dalam tulisan atau akta.<sup>54</sup>

Dalam hal surat atau bukti catat-mentatat, ada satu ayat Al-Qur'an yang menyuruh setiap kegiatan muamalah untuk dituliskan, yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. {Q.S. Al-Baqarah (2): 282}<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Yahya Harahap, *Op cit*, h. 564

<sup>55</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), h. 60

## F. Pembuktian dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pembuktian

#### a. Pengertian

Menurut Prof. Dr. Supomo menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>56</sup> Membuktikan berarti usaha untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang dalil atau sangkalan yang diajukan

#### b. Dasar Hukum

Hukum pembuktian bagian hukum acara perdata, diatur dalam:

- 1) Pasal 162 – 177 HIR;
- 2) Pasal 282 – 314 RBg;
- 3) Pasal 1885 – 1945 BW;
- 4) Pasal 74 – 76, 87 – 88 UU No 7 Thn 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009.<sup>57</sup>

#### c. Teori Pembuktian

- 1) Teori hukum subyektif (teori hak)

---

<sup>56</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), h. 15

<sup>57</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 159



Teori ini menetapkan bahwa barangsiapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.

## 2) Teori hukum objektif

Teori ini mengajarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

## 3) Teori hukum acara dan Teori kelayakan

Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama yakni hakim seyogianya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian. Asas *audi et alteram partem* atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, dengan demikian hakim harus memberi beban kepada kedua belah pihak secara seimbang dan adil sehingga kemungkinan menang antara para pihak adalah sama.

Sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan adalah hakim, dan hanya *judex facti*. Terdapat 3 (tiga) buah teori bagi hakim di dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak:

### 1) Teori pembuktian bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.<sup>58</sup>

### 2) Teori pembuktian negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang dengan pengecualian. (Pasal 306 RBg/169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara)

Pasal 306 RBg/169 HIR :

“Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum “

Pasal 1905 KUHPerdara :

“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), h. 23

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 24

### 3) Teori pembuktian positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat.

(Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 KUHPerdara)

Pasal 285 RBg/165 HIR :

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut.”

Pasal 1870 KUHPerdara :

“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa hukum pembuktian terdiri dari :

- 1) Pembuktian formil, mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam RBg/HIR.

2) Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktian dari bukti itu.<sup>60</sup>

## 2. Alat Bukti Menurut Hukum Positif

Sebelum membahas lebih jauh mengenai macam-macam alat bukti, maka terlebih dahulu harus diketahui dan dimengerti beberapa pengertian tentang bukti.

### a. Bukti lemah

Bukti lemah adalah alat bukti yang dikemukakan penggugat yang sedikitpun tidak memberikan pembuktian atau memberikan pembuktian tetapi tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk menerima dalil-dalil gugatan, artinya alat bukti ini hanya mempunyai daya bukti permulaan (*kracht van begin bewijs*). Jadi derajat bukti yang dibutuhkan belum tercapai oleh karena itu gugatan harus ditolak dan penggugat sebagai pihak yang kalah. Daya bukti permulaan saja tidak dapat menjadi dasar hakim bagi penerimaan suatu gugatan.<sup>61</sup>

### b. Bukti sempurna

Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian,

---

<sup>60</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), h. 25

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 19

bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.

c. Bukti pasti/menentukan (*Beslissend Bewijs*)

Akibat diajukan pembuktian dengan alat bukti yang mempunyai daya bukti pasti/menentukan, maka terhadap pembuktian tersebut tidak diperbolehkan untuk memajukan bukti sangkalan. Pembuktian dengan alat bukti pasti/menentukan, mengakibatkan bagi penggugat atau tergugat yang mengemukakan alat bukti tersebut, suatu posisi yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dengan demikian tuntutan yang diajukan dianggap benar, beralasan dan dapat diterima. Peluang pihak lawan untuk mengajukan bukti sangkalan tidak ada lagi.

d. Bukti yang mengikat (*Verplicht Bewijs*)

Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan pembuktian tersebut. Contoh dalam hal ini adalah adanya sumpah pemutus (sumpah *decissoir*).

e. Bukti sangkalan (*Tengen Bewijs*)

Bukti sangkalan adalah alat bukti yang dipergunakan dalam bantahan terhadap pembuktian yang diajukan oleh lawan dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk menggagalkan gugatan pihak lawan. Pada prinsipnya segala bukti dapat dilemahkan dengan bukti sangkalan,

kecuali undang-undang sendiri secara tegas melarang diajukannya suatu alat bukti sangkalan, misalnya terhadap sumpah pemutus (sumpah *decissoir*) yang diatur dalam Pasal 1936 KUHPerdara.<sup>62</sup>

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti ke dalam kategori:

*a. Oral Evidence*

- 1) Perdata (keterangan saksi, pengakuan dan sumpah)
- 2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).

*b. Documentary Evidence*

- 1) Perdata (surat dan persangkaan)
- 2) Pidana (surat dan petunjuk)

*c. Material Evidence*

- 1) Perdata (tidak dikenal)
- 2) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang digunakan untuk membantu tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana, barang yang diperoleh dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus)

*d. Electronic Evidence*

Konsep pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti tertulis dan elektronik. Konsep ini terutama berkembang di negara-negara *common*


---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 20



*law*. Pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*.<sup>63</sup>

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang dimajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan. Secara umum pembuktian dapat dilakukan dengan mengemukakan surat, saksi, ahli dan sumpah.<sup>64</sup> Alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia, diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHPer, yaitu :

- 
- a Alat bukti dengan surat/tulisan
  - b Alat bukti saksi
  - c Alat bukti persangkaan (dugaan)
  - d Alat bukti pengakuan
  - e Alat bukti sumpah
  - f Alat bukti pemeriksaan setempat (*discente*)
  - g Alat bukti keterangan ahli (*expertise*)<sup>65</sup>

Ada juga alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam undang-undang yaitu :

- a Foto
- b Film

---

<sup>63</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, h. 100

<sup>64</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama & Bidangannya* (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. 119

<sup>65</sup> K.Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), h.71.

- c Rekaman video/tape/CD
- d Mikrofilm
- e Mikrofische.<sup>66</sup>

Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, mikrofilm atau mikrofische dapat dijadikan alat bukti surat dengan catatan bila bisa dijamin keotentikannya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana maupun perdata.

### 3. Alat Bukti Surat

Masyarakat atau setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, bentuk atau kepentingannya dapat sama dan dapat berlainan, bahkan dapat juga bertentangan satu sama lain. Fungsi dari hukum yaitu mengatur sehingga setiap orang dapat terpenuhi kepentingannya secara seimbang, dengan cara mengatur tiap orang dalam hubungan serta pergaulannya di dalam masyarakat agar saling menghormati hak-hak dan kewajibannya. Hukum memuat semua peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum dan kepentingan-kepentingan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain.<sup>67</sup> Kepentingan setiap orang, dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain, hal tersebut akan memicu terjadinya suatu perselisihan atau

---

<sup>66</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi* (Bandung :CV.Mandar Maju, 2005), h. 41

<sup>67</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 48.

sengketa yang mana akan menimbulkan gugatan dari pihak atau orang yang merasa haknya dirugikan.

Tugas Hakim terbatas hanya menerima dan memeriksa sepanjang hal-hal yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil, kebenaran tersebut diwujudkan atas dasar fakta dan alasan yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sifat pasif tersebut, hakim harus memiliki keyakinan yaitu apa diminta penggugat ialah benar, apabila penggugat tidak mampu mengajukan bukti terkait kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus dapat menyingkirkan keyakinan tersebut, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan.<sup>68</sup>

Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 164, 284, 285, 293, 294, Rbg. Pasal 1867 -1894 KUHPerdata (BW). Pengertian alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dimaksud mencurahkan isi hati dan buah pikiran dipergunakan sebagai pembuktian. Adapun alat bukti tertulis dimaksud berupa akta, yakni surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dan suatu hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta tersebut terdiri dari :

a. Akta Otentik

Akta yang dibuat oleh dihadapan pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan yang telah

---

<sup>68</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 499

ditetapkan. (psl.285 Rbg.) Syarat formilnya : Pada prinsipnya bersifat partai; dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang; memuat tanggal (hari), bulan, dan tahun pembuatan; ditandatangani oleh yang membuat. Syarat materilnya : isi yang tertuang didalamnya berhubungan langsung dengan apa yang diperjanjikan atau diperkarakan; isi akta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum; pembuatannya sengaja untuk dipergunakan untuk alat bukti.

Adapun kekuatan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bidende*), sepanjang tidak dilawan dengan alat bukti yang sederajat dengannya. (psl. 285 Rbg. Psl.1868 KUHPerdara). manakala ada perlawanan dengan akta yang sederajat dengannya, maka alat bukti otentik dimaksud kekuatan nilai pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain, agar mencapai batas minimal pembuktian.

#### b. Akta Di bawah Tangan

Akta Dibawah Tangan, ialah; akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa melibatkan/bantuan pejabat umum yang berwenang. Syart formilnya: bersifat partai; pembuatannya tidak dihadapan pejabat; harus bermaterai; ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan perikatan/perjanjian, (yang disamakan dengan tandatangan ini ialah cap jempol. psl. 286 Rbg. Psl. 1.aOrdonansi 1867 No.29). Akta seperti ini dapat disyahkan oleh Pejabat/Notaris, dan bertanggal. Dan pejabat tersebut harus menyatakan/menerangkan bahwa

ia kenal atau diperkenalkan dengan orang yang bercap jempol tersebut, dan isi surat itu sudah dibacakan dengan terang dihadapan orang itu sebelum dibubuhkan cap jempolnya. Surat itu dibukukan oleh Pejabat. Syarat materilnya: isi Akta berkaitan langsung dengan apa yang diperjanjikan/diperkarakan; isi akta tidak beretentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum; sengaja dibuat untuk alat bukti.

Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan bukti otentik, selama isi dan tandatangannya diakui atau tidak disanggah. Akan tetapi bila isi dan tandatangannya tidak diakui atau disanggah, maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bukti permulaan, sehingga harus ditambah dengan bukti yang lain.

c. Akta sepihak

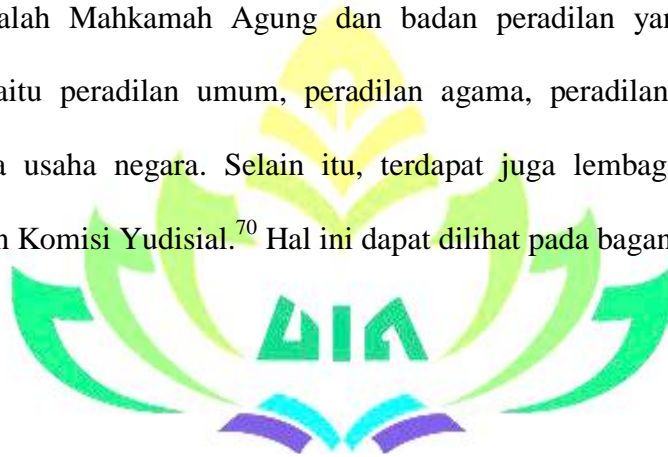
Akta sepihak adalah akta yang ditulis dan ditanda tangani sendiri (sepihak). Contoh bukti pembayaran dengan kwetansi. Syarat formilnya: ditulis sendiri seluruhnya oleh yang menandatangani, atau sekurang-kurangnya menulis sendiri dengan huruf (untuk sejumlah uang), bukan dengan angka; diberi tanggal, bulan dan tahun, serta ditandatangani oleh pembuat. Syarat materilnya: isi Akta berkaitan dengan yang diperjanjikan/diperkarakan; isi Akta tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum; sengaja dibuat untuk alat bukti.

Adapun kekuatan nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, bila isi dan tandatangannya diakui. Bila tidak diakui isi dan tandatangannya, maka jadilah ia sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti

tambahan, dan nilai pembuktiannyapun menjadi bebas (tidak mengikat).<sup>69</sup>

### **G. Pembuktian dan Alat Bukti Yang Digunakan di Pengadilan Agama**

Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah pasal 24 ayat (2) dan pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.<sup>70</sup> Hal ini dapat dilihat pada bagan berikut:

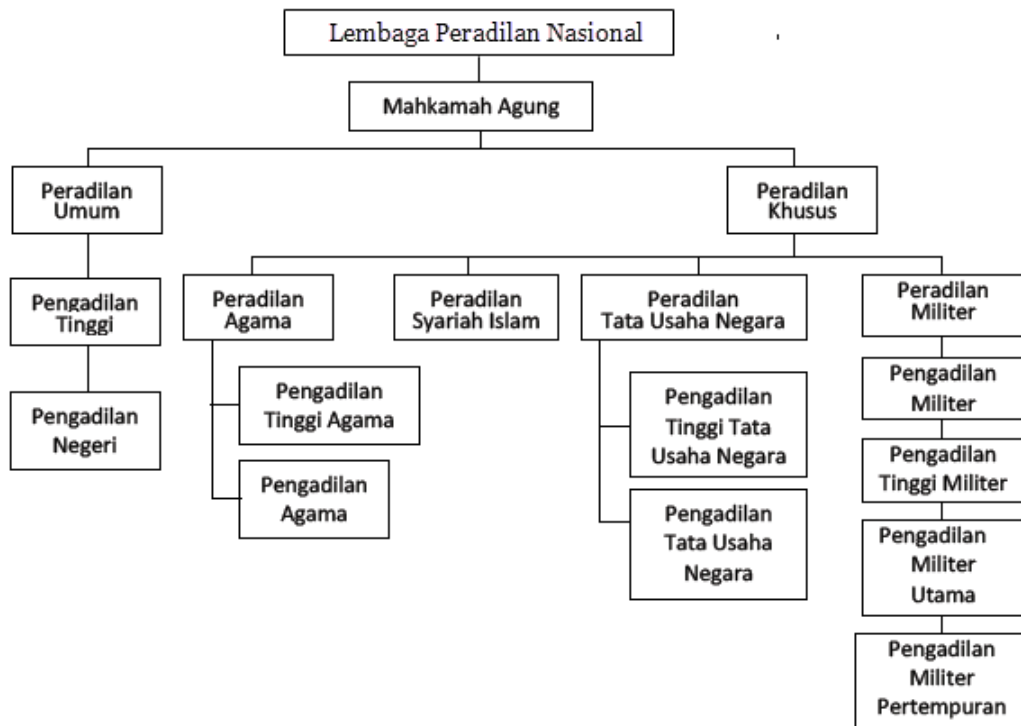


---

<sup>69</sup> Yazid Bustami Dalimunthe, *Penerapan Alat Bukti Tertulis Dalam Pemeriksaan Perkara*. Makalah Oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh, h. 4

<sup>70</sup> *Macam-macam Lembaga Peradilan Hukum di Indonesia* Diakses melalui <http://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-lembaga-peradilan-hukum-di.html> 8 Februari 2017





Pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, atau proses mengadili, atau sidang hakim ketika mengadili perkara. Dari kutipan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pengadilan adalah instansi yang tugas utamanya adalah penegakan hukum melalui menerima, memeriksa dan memutus perkara.<sup>71</sup>

Peradilan Agama adalah sebutan (*titelatur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.<sup>72</sup> Tiga lingkungan Peradilan Negara yang lainnya seperti gambar di atas adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>71</sup> Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013), h. 1

<sup>72</sup> UU No. 14 Tahun 1970, LN 1970-74, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1). Kata-kata “Peradilan Negara” dan “Kekuasaan Kehakiman” adalah semakna

Peradilan agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.<sup>73</sup> Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan pula tidak hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkainya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “ di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala perkara menurut Peradilan Islam universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitative, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>74</sup> Karena hukum Islam mendukung segala prosedur yang memajukan keadilan dan perlakuan adil.<sup>75</sup> Hal itu menunjukkan pula bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui

---

<sup>73</sup> Penjelsan Pasal 10 ayat (1)

<sup>74</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 6

<sup>75</sup> M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah* (Jakarta: Noura Book, 2008), h. 260

peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut ajaran Islam.<sup>76</sup>

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf<sup>77</sup>

Wewenang Peradilan Agama dalam masalah perwakapan tanah ini, meliputi masalah-masalah :

- 1) Wakaf, Wakif, Ikrar, Nadzir dan Saksi. Kewenangan dibidang ini menyangkut sah tidaknya perebuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, saksi dan nadzir .

Didalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh factor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah (harta) yang telah diwakafkan baik oleh wakif atau oleh ahli warisnya . Faktor pendorongnya anata lain :

- a) Makin langkanya tanah
- b) Makin tingginya harga
- c) Menipisnya kesadaran beragama

---

<sup>76</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), h. 6

<sup>77</sup> Yang dimaksud dengan “Wakaf” adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

d) Wakif mewakafkan seluruh atau sebahagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar kehidupannya , akibatnya tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya dan tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada Nadzir atau sama sekali tidak melaporkan.

e) Sikap serakah dari ahli waris atau sama sekali tidak tahu adanya ikrar wakaf karena tidak diberitahu oleh orang tuanya .-

2) *Bayyinah* (alat bukti administrasi tanah wakaf), seperti Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah Wakaf dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan dan tanah wakaf dan termasuk Bayyinah adalah Saksi .-

3) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpanan penggunaan harta wakaf oleh Nadzir dan lain-lain Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perselisihan/ sengketa wakaf juga diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 12 dan PERMENAG No. 1 Tahun 1978 Pasal 17.<sup>78</sup>

f. zakat;

g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Anshoruddin, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Kalimantan Barat: Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, 2016), h. 6

<sup>79</sup> Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Alat bukti yang diakui dalam pembuktian menurut yang digunakan di pengadilan agama antara lain:

1. *Ikrar* (Pengakuan)

Ikrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.<sup>80</sup> Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka hakim persidangan atau di luar persidangan. Adapun syarat peaku ikrar (pengakuan) adalah baligh (dewasa), aqil (berakal/waras), rasyid (punya kecakapan bertindak). Adapun jenis ikrarnya adalah lisan, isyarat dan tertulis.<sup>81</sup>

2. *Syahadah* (Saksi)

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.<sup>82</sup> Adapun syarat menjadi saksi yang dirinci oleh Sayid Sabiq anatar lain; Islam, adil, baligh, berakal, berbicara, afal dan cermat, bersih dari tuduhan.<sup>83</sup>

3. *Yamin* (Sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat

---

<sup>80</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 172

<sup>81</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 139

<sup>82</sup> *Op.Cit.*, h. 160

<sup>83</sup> A. Rohim Kasanhardjo, *Eksistensi Saksi dan Masalahnya Dalam Perkara Perceraian* dalam *Mimbar Hukum* No. 18 Thn. VI 1995, h. 50

sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>84</sup> Sumpah menurut bahasa Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf*, tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Menurut hadits Rasulullah, pihak yang menuntut hak dibebankan untuk membuktikan sedang pembuktian pegingkran (negatif) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah. Jadi pada dasarnya, sumpah ini adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut.<sup>85</sup>

Alat bukti sumpah ini bermacam-macam. Sumpah ini ada yang memiliki bentuk tersendiri, seperti sumpah *li'an* (dalam perkara zina) dan sumpa *qasamah* (di lapangan pidana). Bagaimanapun juga, selain dari sumpah *li'an* dan sumpah pemutus, alat bukti sumpah tidak bias berdiri sendiri. Artinya, hakim tidak bias memutus hanya semata-mata berdasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan saah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan akhir.<sup>86</sup>

#### 4. *Riddah* (Murtad)

*Riddah* adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari agama Islamm (murtad). Tata cara pernyataan *riddah* ini hampir sama dengan ikrar atau pengakuan, namun pelaksanaannya lebih bersifat formal dihadapan pemuka agama. Riddah hanya dipakai untuk pembuktian pada perkara gugatan cerai dalam hal apabila alasan-alasan hukum sebagai bukti gugatan

---

<sup>84</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet.Ke-4(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 178

<sup>85</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 181

<sup>86</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 142

isteri tidak terbukti. Dan karena tidak terbukti itu, maka si isteri berikrar keluar dari agama Islam (murtad) agar perkawinannya dapat putus. Konsekuensi riddah ini adalah apabila si wanita itu meninggal saat dia masih murtad, maka ia tidak boleh dikafankan dan tidak disholatkan.<sup>87</sup>

#### 5. Muktabah (Bukti Tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu:

##### a. Akta

Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompensasi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama. Jenis-jenis akta yang digunakan antara lain, yaitu akta nikah dan akta kelahiran dalam perkara pemeliharaan anak dan ikrar wakaf dalam perkara harta wakaf. Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai "*probationis causa*", sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.<sup>88</sup>

##### b. Surat Keterangan

Surat keterangan di sini digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa. Pengajuan surat sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi batas minimal pembuktian dari surat tersebut, disamping harus memenuhi syarat formal dan material.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 17

<sup>89</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 143



Orang yang melakukan hubungan hukum perdata, tentulah dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagai contoh: sewa menyewa, jual beli tanah dengan menggunakan akta, jual beli menggunakan kuitansi, dan lain sebagainya. Sebelum kami membahas secara mendalam, perlulah dilihat bentuk kerangka surat atau alat bukti tertulis dibawah ini:

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan dan dibuat di depan ataupun oleh pegawai umum atau pejabat pembuat akta tanah itu sendiri, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syarat penandatanganan dapat kita lihat pada pasal 1874 B.W.

*Akta autentik* adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat' (ps. 1868 KUH Perdata).

c. *Tabayun* (Pemeriksaan Koneksitas)

Tabayun adalah upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sedang memeriksa. Contoh dari kasus yang memerlukan pembuktian tabayun ini misalnya dalam kasus kewarisan, dimana harta warisan ada di Tasikmalaya sedangkan perkara waris disidangkan di

Jakarta Timur sehingga memerlukan kekuasaan mejelis pengadilan Tasikmalaya untuk membantu pembuktian keberadaan tanah di daerah kompetensi relatifnya.<sup>90</sup>

## H. Urgensi dan Kewajiban Pembuktian

### 1. Urgensi Pembuktian

Dalam suatu peradilan, ada prosedur-prosedur dan tata cara tertentu bagi seseorang yang ingin mengajukan perkaranya ke pengadilan. Persoalan tersebut diatur dalam suatu peraturan khusus yang disebut Hukum Acara. Di dalamnya diatur tentang tata cara mengajukan suatu perkara ke muka badan peradilan serta cara-cara hakim memberikan putusan.<sup>91</sup>

Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, Ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Teks-teks fiqh tidak lagi diberlakukan dalam realitas konkret tetapi hanya dijadikan bacaan dan wacana *an sih*.

Persoalan ini tentu bukan hal yang mudah untuk kita jawab dengan menyatakan bahwa masyarakat sekarang ini memang sudah bobrok dan

---

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Ctk. Kedelapan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 329

meninggalkan ajaran agama. Tetapi kita harus melihat substansi permasalahan dari soal persaksian tersebut. Ada Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah persyaratan jenis kelamin dalam persaksian itu merupakan sesuatu yang *qoth'i* ataukah sesuatu yang *dzanny*.<sup>92</sup>

Pembuktian diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat oleh penggugat dalam menuntut haknya atau mencari kebenaran dari sanggahan tergugat. Pembuktian diperlukan bila muncul suatu perselisihan terhadap suatu hal di muka peradilan, dimana seseorang mengaku sesuatu sebagai haknya, sedang pihaklain menyangkal pengakuan tersebut. Jadi pembuktian diperlukan hanya terhadap hal-hal yang di perselisihkan, untuk halhal yang tidak dibantah pihak lawan tidak perlu adanya pembuktian.<sup>93</sup> Sebab yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus diajukan dan dibuktikan oleh para pihak.

## 2. Kewajiban Pembuktian

Sesuai dengan tujuan pembuktian yaitu untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa tertentu, maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang dikemukakan oleh para pihak-pihak terhadap sesuatu yang belum jelas atau yang menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan kejadian yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap

---

<sup>92</sup> Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), h. 93

<sup>93</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h.5

tahu hukum, oleh karena itu seorang hakim haruslah mempunyai ilmu pengetahuan hukum yang cukup.

Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa. Kalau pembuktian terhadap peristiwa atau kejadian telah diakui oleh tergugat tidak perlu dibuktikan lagi.
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan waktu.
- c. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan.
- d. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa sering dalam membuktikan suatu hak terdiri dari rangkaian beberapa peristiwa, maka peristiwa atau kejadian tersebut merupakan salah satu mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut.
- e. peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan kesusilaan.<sup>94</sup>

Para pihak yang berperkara berwenang dan berkewajiban mengemukakan bukti apabila diminta oleh hakim. Hakim yang akan menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian tersebut. Pihak yang dibebankan wajib bukti akan mengandung resiko bahwa jika tidak berhasil maka pihak tersebut akan dikalahkan. Lazimnya, penggugat sebagai pihak

---

<sup>94</sup> Abdul Mannan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.IV; Jakarta: Kencana, 2006), h. 227.

yang memulai dahulu menggugat, kalau dibantah oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya. Demikian pula jika tergugat di dalam bantahannya mengajukan tuntutan, maka hal itu harus dibuktikan pula.

Jadi beban pembuktian itu bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat. Pembuktian tersebut tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, oleh karena itu hakim haruslah berhati-hati dalam menetapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang dan patut dan tidak berat sebelah.<sup>95</sup>

### 3. Cara-Cara Pembuktian

Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim ada 26 cara. Dalam pada itu, sebagian besar para fuqaha antara lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, bukti (*hujjah*). Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri. Si penggugat tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya lagi. Akan tetapi si penggugat, dapat dipaksa menjawab untuk mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka pengadilan.

Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat

---

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 281

dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberika bukti, maka atas permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memutuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.<sup>96</sup>

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari para pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada buktibukti otentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Dalam kaitan ini, terdapat hadits yang berbunyi:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالذِّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

"Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah sendiri yang mengendalikan batin manusia"<sup>97</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, maka sebenarnya yang dicari di pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil. Hal itu tercermin dalam satu kasus. Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit

---

<sup>96</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* , 136

<sup>97</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari para pihak untuk sejujurnya menyatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkannya pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).<sup>98</sup>



---

<sup>98</sup> *Ibid*, 51



### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang**

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m<sup>2</sup> diatas tanah seluas 400 m<sup>2</sup>. Bangunan yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

###### **a. Dasar Kebutuhan**

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah

bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau Landraad, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat.

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.

#### b. Dasar Yuridis

Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial Belanda akhirnya mengeluarkan :

- 1) Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610)
- 2) Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)

c. Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor.

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya.

Kewenangan Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung dalam  
Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu meliputi :

- 1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- 2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- 3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- 4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- 5) Mengurus soal-soal peribadatan.
- 6) Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syaria'h Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syaria'h, karena dianggap tidak mempunyai status hukum.

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian

Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”.

Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal

29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor: 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung.

Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan

Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat.

Lembaga tersebut antara lain :

- Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- Organisasi Jami'atul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama ( Mahkamah Syariah) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariah di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang



Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung.

Wewenang Mahkamah Syariah dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.<sup>99</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang

### a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Bersih, Berwibawa, Dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum".

Merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supremasi hukum. bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu

---

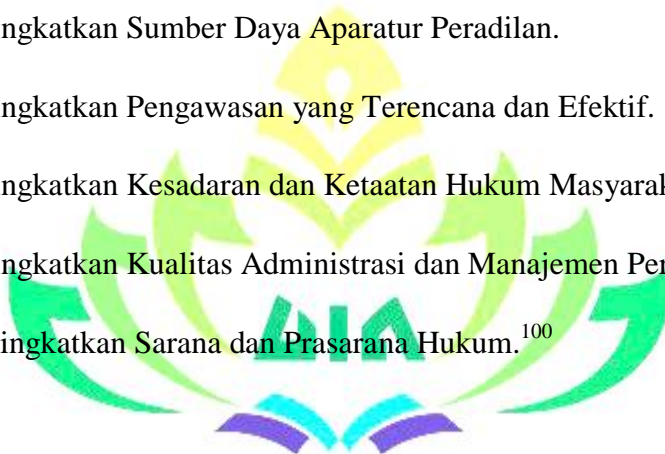
<sup>99</sup> *Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang. On.Line.* tersedia di <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/sejarah-pa>

proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Peradilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah:

- 1) Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- 3) Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- 4) Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- 5) Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan
- 6) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.<sup>100</sup>



**B. Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bahwa jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

1. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

---

<sup>100</sup> Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang, On.Line. tersedia di <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/visi-dan-misi>

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keuasannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

## 3. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

## 4. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

## 5. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

#### 6. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### 7. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

#### 8. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt. dan pahala semata.

#### 9. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- a) Bank syari'ah;
- b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- c) Asuransi syari'ah;
- d) Reasuransi syari'ah;
- e) Reksa dana syari'ah;
- f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g) Sekuritas syari'ah;
- h) Pembiayaan syari'ah;
- i) Pegadaian syari'ah;<sup>101</sup>

### **C. Perkara No. 0077/Pdt.G/2012/PA.Tnk**

Aturan mengenai wakaf di Indonesia telah dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan berkembang hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 62 Ayat (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa

---

<sup>101</sup> *Jenis-Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama*, On.Line: <http://www.pa-kruki.go.id/jenis-perkara-dan-kewenangan/>



dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004, maka penyelesaian sengketa perwakafan menurut Hukum Islam Yang sudah menjadi Hukum Nasional adalah: Musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi, arbitrase serta melalui pengadilan agama.

Perkara 77/Pdt.G/2012/PA.Tnk ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A pada tanggal 18 Januari 2012. Untuk lebih jelas, perkara ini dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Pihak-Pihak

Dalam kasus ini terdapat penggugat dan tergugat yang kemudian dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Penggugat

- 1) Masnoor Ismair Bin Permata Mail, umur 69 tahun, pekerjaan Pensiunan Abri, bertempat tinggal di Jalan Dakwah No. 37, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
- 2) M. Sobiri Sadjad Bin Sadjad, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Z.A Pagar Alam No. 73, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

- 3) Zahiruddin Bin St. Umar Said, umur 70 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Dakwah No. 5 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
- 4) Ali Akbar Bin Sili, umur 74 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Dakwah No. 28, Labuhan Ratu, Bandar Lampung
- 5) Yahya Abidin Bin Supardi Sudirjo, umur 52 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Gg. Harapan II No. 49 Labuhan Ratu, Bandar Lampung

b. Tergugat

- 1) PPM cq PDM Kota Bandar Lampung dengan alamat Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abi Hasan Mu'an, SH, MH, Yudi Yusnandi, SH. Advokat pada kantor "Abi Hasan Mu'an dan Rekan" beralamat di Jl. Amir Hamzah No. 40 Gotong Royong, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas 1A Register Nomor 57/Kuasa/2012/PA.Tnk tanggal 28 Maret 2012.

2. Duduk Perkara

Terdapat lima (5) orang penggugat yang bertempat tinggal di Labuhan Ratu, Bandar Lampung bersengketa dengan Pimpinan Perserikatan Muhammadiyah Cq. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, berkantor di Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam Nomor 14 Labuhan Ratu, Bandar Lampung yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Penggugat dalam hal ini mendalilkan bahwa tergugat yang kedudukannya sebagai Nadzir yang sah untuk mengurus dan mengelola tanah wakaf dari Alm. RSDD yang semula seluas 13.368, 75 meter persegi yang terletak di Jalan H. Zainal Abidin Pagar Alam, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, namun akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab tanah wakaf tersebut tersisa 9.295 meter persegi. Kemudian, mengenai peruntukan tanah wakaf yang awalnya diwakafkan oleh wakif bagi masyarakat di Labuhan Ratu, kini digunakan sebagai lembaga pendidikan, yakni lembaga pendidikan perguruan Muhammadiyah Lampung.

Dalam inti gugutannya, Pengugat menginginkan tanah wakaf sebagaimana disebut di atas untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Muslim secara umum, khususnya di lingkungan tanah wakaf sebab warga sekitar adalah mauquf alih dari wakaf tersebut. Pengugat mengkhawatirkan penggunaan tanah wakaf tersebut hanya dinikmati perserikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung untuk dijadikan lembaga pendidikan. Maka, pada intinya adalah Pengugat ingin mengembalikan manfaat dari tanah wakaf tersebut untuk dapat digunakan oleh umat muslim, khususnya bagi warga di Labuhan Ratu.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

Pada awalnya, hukum Islam hanya mengatur persoalan muamalah yang harus ditulis atau dicatat hanyalah pada urusan hutang-piutang sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah (2):282. Kemudian berkembangnya keadaan, maka ayat ini juga dapat dirujuk untuk mencatat hal-hal penting yang kemudian akan menimbulkan peristiwa hukum, misalnya pencatatan perkawinan. Hal ini juga senada misalnya dengan pencatatan bukti-bukti penting, seperti sertifikat, surat ketengan dan hal semisal lainnya.

Islam sesungguhnya terbuka dengan berbagai alat bukti, dalam hal ini alat bukti surat yang boleh jadi hal ini adalah adopsi dari hukum perdata umum. Namun, jika dilihat dari segi kemanfaatan penggunaan alat bukti surat dalam hukum perdata Islam dinilai sudah sangat tepat. Mengingat begitu pentingnya surat sebagai bukti dari suatu perbuatan hukum.

Dalam perkara perdata, kebenaran yang dicarai adalah kebenaran formil. Maka, sebagaimana urutan dalam pembuktian, alat bukti surat berada pada daftars paling utama jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya.

Dalam pembuktian suatu perkara perdata alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Alat bukti yang digunakan adalah alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu; bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setiap alat bukti dapat digunakan oleh Hakim dalam melakukan pembuktiannya.

Alat bukti dalam proses pembuktian menyatakan penyebutan alat-alat bukti secara berurutan bukan hanya sekedar tata cara penulisan tetapi menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata lebih diutamakan pada urutan pertama, yaitu pada alat bukti keterangan surat. Walaupun pembuktian dalam hukum acara perdata diutamakan pada alat bukti keterangan surat, namun hakim tetap harus hati-hati dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam pembuktian.

Alat bukti surat yang digunakan oleh hakim dalam tuntutananya tentu saja memiliki kekuatan yuridis. Hakim yang mengadakan pemeriksaan di persidangan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan. Oleh karena itu, penilaian atas kekuatan alat bukti surat hanya dilakukan oleh hakim.

Alat bukti tertulis sendiri diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW baca juga pasal 138-147 Rv. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimasukkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis.

Orang yang melakukan hubungan hukum perdata, tentulah dengan sengaja ataupun tidak membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak dapat digunakan atau dijadikan bukti kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Sebagaimana sudah diketahui, bukti tulisan dalam perkara

perdata merupakan alat bukti yang paling utama, karena dalam lalu-lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dimungkinkan timbul permasalahan dalam hal ini perselisihan/persengketaan dan lazimnya bukti yang disediakan berupa tulisan.

Wakaf adalah salah satu ibadah yang memiliki kaitan hubungan dengan sesama, untuk itu pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan sesuai tujuan dan aturan yang ada guna mencapai kemanfaatan wakaf dengan baik. Telah terbitnya aturan mengenai perwakafan adalah bukti perhatian pemerintah dalam pertumbuhan dan perkembangan wakaf. Aturan perwakafan tersebut telah mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan, mulai dari penjelasan pengertian, rukun dan syarat, tata cara pelaksanaan wakaf, pengelolaan wakaf serta upaya penyelesaian sengketa wakaf. Untuk itu pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan seksama agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wakaf atau bahkan menimbulkan sengketa.

Salah satu sengketa yang terjadi di Kota Bandar Lampung mengenai wakaf adalah sengketa wakaf yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bandar Lampung dengan nomor perkara 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk. Perkara tersebut adalah perkara wakaf yang digugat oleh masyarakat sekitar tanah wakaf di wilayah Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Penggugat memiliki alasan menggugat karena jumlah luas tanah wakaf tersebut berkurang dari 13.368.75 meter persegi menjadi 9.295 meter persegi dan dikhawatirkan peruntukan tanah wakaf berubah, yang semula untuk masyarakat umum menjadi khusus bagi Persyakitannya Muhammadiyah Kota Bandar Lampung. Kekhawatiran lainnya adalah mengenai peruntukan wakaf,

yang semula untuk masyarakat sekitar Labuhan Ratu akan beralaih hanya kepada Perserikatan Muhammadiyah saja.

Berkurangnya luas tanah wakaf tersebut tidak diketahui oleh pengurus Persyakitn Muhammadiyah Kota Bandar Lampung yang sekarang selaku nadzir, sebab nadzir pada saat akad wakaf tersebut telah meninggal dunia. Nadzir yang sekarang hanya mengetahui luas tanah hanya 9.295 m<sup>2</sup> yang kemudian sudah memiliki sertifikat tanah wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kekhawatiran masyarakat sekitar sudah cukup untuk dijadikan dalil hukum membawa kasus ini ke pengadilan agama.

Dalam memeriksa perkara, hakim telah memiliki pedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan alat bukti menjadi hal yang diperukan dalam persidangan. Alat bukti tertulis, seperti sertifikat tanah wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, identitas para pihak dan berkas-berkas lainnya diperiksa di muka sidang, tak terkecuali keterangan saksi. Keterangan saksi dalam kasus ini dianggap sangat penting, sebab bukti tertulis sudah dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Sedangkan hakim memerlukan keterangan saksi dikarenakan saksi mengalami, melihat dan mengetahui perkara yang terjadi.

Keterangan saksi dalam perkara nomor 077/Pdt.G/2012/PA.Tnk memberikan pandangan hakim dalam memutus perkara dengan seksama. Setelah terpenuhinya syarat-syarat saksi, baik secara formil dan materiil menjadikan keterangan saksi dalam perkara ini dapat diterima. Saksi yang telah dewasa, sehat akal, dan adil menjadi salah perhatian dalam memperhatikan kesaksian para saksi. Untuk itulah dalam menilai suatu kesaksian hakim jangan hanya berpedoman pada hukum formal saja, karena pada hakekatnya hukum formal itu mengabdikan kepada



kepentingan hukum material, sehingga keadilan benar-benar dapat dilahirkan dari lembaga peradilan.

Kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh saksi baru bisa dianggap sebagai alat bukti dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim jika saksi memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan dan berada di bawah sumpah. Kerena fungsi saksi adalah untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat atau Pemohon atau bantahan Tergugat atau Termohon. Di Pengadilan Agama Tanjung Karang alat bukti yang biasa digunakan adalah alat bukti tertulis, saksi dan pengakuan, sedangkan dalam pembuktian yang paling sering digunakan oleh para pihak adalah alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Sedangkan alat bukti pengakuan jarang dipakai.

Dalam pasal 172 HIR/Pasal 309 RBg dinyatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, hakim harus memperhatikan khusus kecocokan kesaksian satu dengan kesaksian yang lain. Kecocokan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang ada di persidangan diketahui dari sumber-sumber lain mengenai duduk perkara.

Sebagian Penggugat yang pada dasarnya adalah saksi awal ketika wakaf ini terjadi memiliki dasar yang cukup, namun tidak adanya bukti tertulis serta keterlibatan ahli waris wakif, maka keterangannya buktinya tidak bersifat tertulis. Berbeda dengan keterangan nazir yang kedua, mereka telah membuatkan akti BWI atas tanah wakaf tersebut, dimana sesuai tata urutan pembuktian, alat bukti tertulis menduduki posisi yang lebih dahulu.

Selain itu, fungsi saksi juga sebagai tambahan untuk menguatkan dalil penggugat. Karena jika apa yang dikatakan Penggugat dan saksi berbeda, maka dalil-dalil yang diajukan Penggugat bisa ditolak oleh Majelis Hakim. Walaupun

saksi berfungsi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan tergugat, di lapangan yang sering terjadi adalah hakim hanya memperhatikan keterangan saksi yang meneguhkan dalil-dalil yang dibutuhkan. Karena setiap muslim harus menyadari betul yang diketahuinya, detail dalam menyampaikan berita, memiliki kepastian dalam menceritakan ucapan orang lain, menghindari isu dan omongan yang tidak jelas kebenarannya serta berusaha untuk bersikap jujur dalam setiap ucapannya.

Selanjutnya tidak diketahuinya oknum yang membuat luas tanah wakaf jadi berkurang, menandakan bahwa nadzir yang sekarang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk mengusut hilang atau berkurangnya luas tanah wakaf tersebut sebaiknya dilakukan proses investigasi lebih lanjut. Untuk itu apa yang diputus oleh hakim pada tahap pertama, sudah tepat yang kemudian didukung oleh putusan hakim tingkat banding.

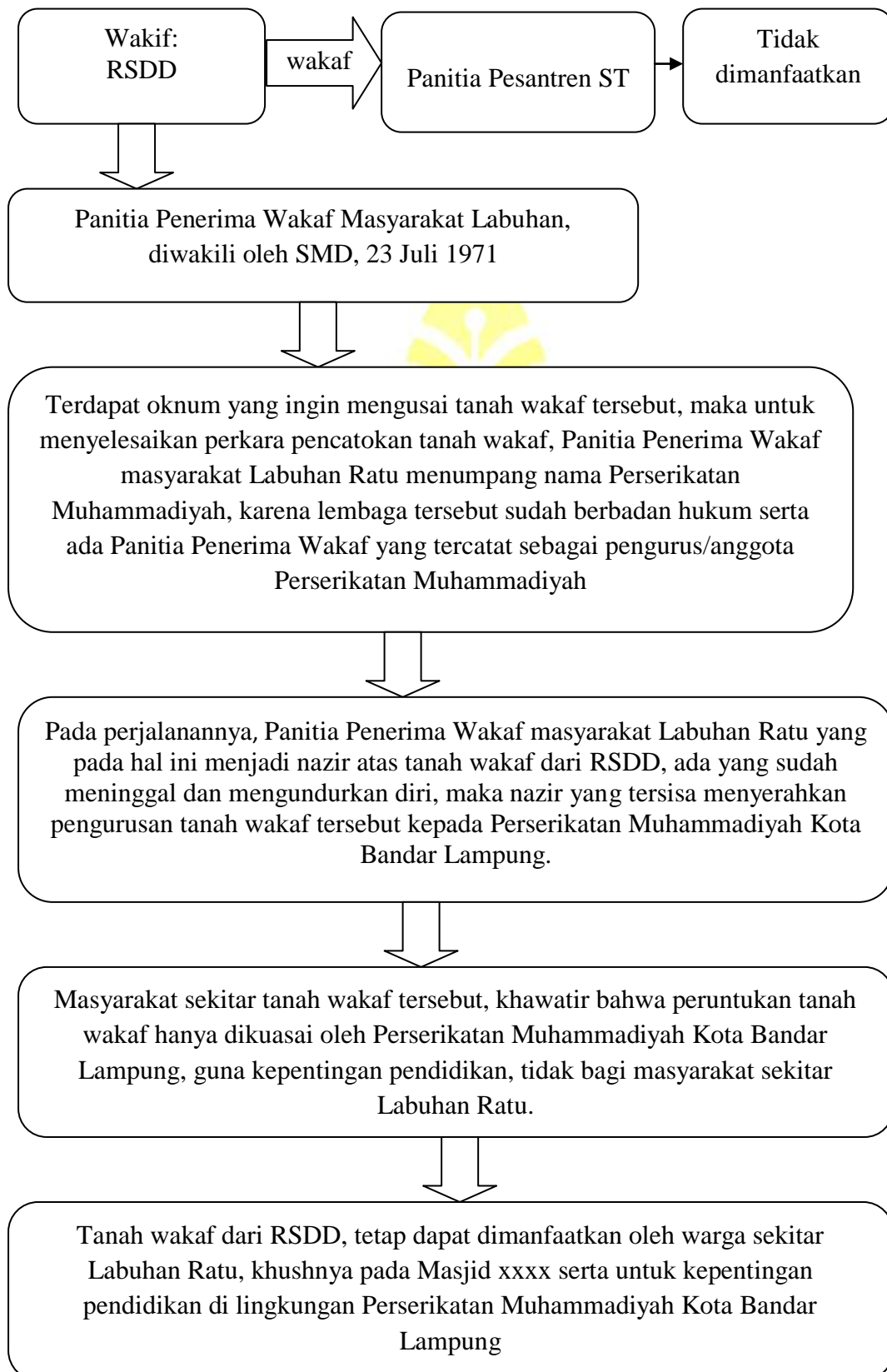
Menurut Tergugat, peruntukan tanah wakaf tersebut tidaklah dibatasi peruntukannya hanya bagi perserikatan Muhammadiyah yang pada hal ini digunakan sebagai lembaga pendidikan Muhammadiyah. Akan tetapi, masyarakat sekitar Labuhan Ratu dan sekitarnya juga bisa memanfaatkan wakaf tersebut.

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian warga Labuhan Ratu atau yang dalam hal ini disebut Penggugat, bahwa salah satunya mereka ingin pengelolaan Masjid xxxx yang terletak pada tanah wakaf tersebut berada di tangan masyarakat Labuhan Ratu, tidak semata diurus oleh Perserikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung.

Untuk keinginan tersebut, maka Perserikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung, tidak menutup diri dengan warga sekitar dalam pengurusan serta

pengelolaan Masjid xxxx tersebut. Akan tetapi bagi warga Labuhan Ratu yang ingin memakmurkan masjid dapat melakukannya dengan niat yang baik.

Memang, jika melihat perkara ini, boleh dikatakan perkara wakaf yang cukup, maka penulis mencoba membuat skema sebagai berikut.



Mengenai penguurangan luas tanah, pihak Muhammadiyah tentu tidak mengetahui penyebab hal ini tersebut. Ini dikarenakan pihak Muhammadiyah hanya mengurus pembuatan sertifikat wakaf sesuai apa yang disampaikan oleh nadzir sebelumnya. Sesungguhnya tidak ada juga upaya untuk mengusai tanah wakaf tersebut oleh nadzir atau pihak Muhammadiyah. Yang terjadi hanyalah kesalahpahaman antara nadzir atau pihak Muhammadiyah dengan warga sekitar.

Peruntukan tanah wakaf yang kini menjadi lembaga pendidikan dinilai sudah tepat. Ini justru membuka peluang bahwa tidak hanya warga sekitar Labuhan Raru yang menikmati tanah wakaf tersebut dalam bidang pendidikan, melainkan berbagai pihak dari berbagai tempat.

Beban pembuktian yang ditanggung para pihak, hanya dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan diakui. Posisi alat bukti saksi dibutuhkan untuk memperkuat alat bukti surat sebagai alat bukti utama dalam kasus ini. Sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia telah menjadi acuan utama hakim dalam memutus perkara ini. Saksi, dalam hal ini nadzir dari pihak Muhammadiyah yang memegang surat tersebut tidak melakukan tindakan hukum ilegal terkait wakaf yang dikelolanya.

Pihak Muhammadiyah Kota Bandar Lampung selaku pihak tergugat mampu membuktikan duduk perkara dengan menunjukkan alat bukti surat berupa sertifikat wakaf dari Badan Wakaf Indonesia, sedangkan pihak penggugat tidak mampu menunjukkan alat bukti surat yang sah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menilai perkara ini. Untuk itu, alasan penggugat tidak dapat dibenarkan karena hakim berpegang pada sertifikat wakaf yang telah memiliki kekuatan hukum untuk tanah wakaf tersebut

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hakim dalam memutus perkara No.77/Pdt.G/2012/PA.Tnk cenderung lebih mengedepankan bukti tertulis berupa surat. Surat tersebut adalah surat sah yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia dan memiliki kekuatan hukum karena tergolong dalam akta otentik. Kemudian hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara Peradilan Umum termasuk Peradilan Agama yang ada di Indonesia, diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHPerdara.

#### **B. Saran**

Setelah kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan saran kepada semua pihak yang terkait dalam permasalahan ini:

1. Kepada lembaga-lembaga (KUA, BWI, Kementerian Agama, dll) yang memiliki perhatian dalam bidang perwakafan untuk lebih gencar dalam melaksanakan sosialisasi tentang wakaf, baik pemahaman maupun strategi dalam pengembangan pemanfaatan wakaf serta pelaksanaan aturan yang berlaku
2. Kepada calon wakif dan nadzir hendaknya melakukan perjanjian wakaf secara jelas dan tertulis agar pemanfaatan harta wakaf dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan kemaslahatan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press, Jakarta 1998.
- Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Bairut : Dar al-Fikr, Tanpa Tahun
- Al-Humaidi, Abdurrahman Ibrahim. *al-Qadha' Wa Nizamuhu Fi al-Kitab Wa al-Sunnah* (Cet. I) al-Makkah al-Arabiyah al-Saudi, Jani" ah Umm al-Qura, 1989.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin* (Jilid I) Mesir : Mathba" ah Sa" adah, tt.
- *I'lam al-Muwaqqi'in*, cet. II. Beirut : dar al-Fikr, 1977.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib. *Islam Happy Ending*. Bandung: Pustaka Hidayat 2008.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Anas, Mohammad. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Saksi Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anshoruddin, *Penyelesaian Sengketa Perwakafan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Kalimantan Barat: Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, 2016.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ash-Shan'aniy, Muhammad ibn Ismail. *Subulus Salam*, Juz 3, Mesir, Tanpa Tahun.
- Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*. Kairo : Mushthafa Halabi, Tanpa Tahun.
- As-Shiddieqie, Hasbie *Filsafah Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- Aza, *Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, On.Line: <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>.
- Baidowi, *Tata Cara Pemeriksaan Saksi di Persidangan*. Aceh: Forum Diskusi Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: Al Maarif, 1977.
- Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik, Proyek pembinaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1984.
- Effendie, Bahtiar. Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fadlullah, Muhammad dan th. Brondgeest, *kamus Arab-Melayu*, Jakarta: Balai Pustaka, 1972.
- Hamid, Andi Tahir. *Peradilan Agama & Bidangnyanya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Haryanto, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hidayat, Komaruddin. *Life's Journey*. Jakarta: Noura Books, 2013.
- Hutapea, Novelina MS. *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal : Habonaron Do Bona; Edisi 2, Juli 2010
- Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*. Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1960.
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002
- Jenis-Jenis Perkara Yang Menjadai Kewenangan Pengadilan Agama*, On.Line: <http://www.pa-krui.go.id/jenis-perkara-dan-kewenangan/>
- Kamali, M. Hashim. *Membumikan Syariah*. Jakarta: Noura Book, 2008.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Ctk. Kedelapan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Kasanhardjo, A. Rohim. *Eksistensi Saksi dan Masalahnya Dalam Perkara Perceraian dalam Mimbar Hukum No. 18 Thn. VI 1995*.
- Katsiir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid II*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012.
- Latif, H.M. Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lubis, Sulaikin. Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.



- Madkur, Muhammad Salman. *Al Qada'u Fy Islam*. Mesir: Dar an Nahdah Al-Qalyuby, t.t.
- Mahardi, Miki. *Keterangan Satu Orang Saksi Yang Dikuatkan Dengan Sumpah Penggugat Sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Ditinjau Dari hukum Islam*. Padang: Universitas Andalas, 2011.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Sudjono. Bandung: Almaarif, 1981.
- Majid, Nurcholis. *Keislaman yang Hanif*. Jakarta: Imania, 2013.
- Pencerahan Satu Menit*. Jakarta: Imania, 2013.
- Mannan, Abdul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Cet.IV. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Enam. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2002.
- M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Nasution, Harun & TIM Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nawawi, *Ar-Raudhah*. Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, Tanpa Tahun.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta, 1992.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prihatin, Farida. *Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf(Fiqh Wakaf)*
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 1. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004.

- Rijal, Fiqihi. *Alat Bukti Dalam Pengadilan Agama*. On.Line: [http://pa-marabahan.go.id/index.php?content=mod\\_berita&id=263](http://pa-marabahan.go.id/index.php?content=mod_berita&id=263)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Cet.VII). Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah-14*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Samudera, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang diakses melalui <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/sejarah-pa> (1 September 2016)
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Tahir Hamid, Andi. *Tahir Peradilan Agama & Bidangannya*. Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni, 1993.
- Tim Penyusun, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005.
- Tim Penyusun, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2005.
- Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang diakses melalui <http://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/2016-03-25-05-41-11-1129566/visi-dan-misi> Pada 1 September 2016.
- Zuhaili, Wahbah. *Ensiklopedia Akhlak Muslim*. Jakarta: Noura Book, 2014.